



# PENYELUNDUPAN 23 KG SABU DARI MALAYSIA DIGAGALKAN

BACA HALAMAN 2-3



DINAKERTRANS  
MEMPROYEKSIKAN UMP  
KALTARA TAHUN 2024 NAIK

BACA HALAMAN 8



Penyelundupan 23 kg sabu berhasil digagalkan.

ADE/MKR

# Penyelundupan 23 Kg Sabu dari Malaysia Digagalkan

TARAKAN – Tim gabungan yang terdiri dari Tim Second Fleet Quick Response Lantamal XIII Tarakan, BNNP Kaltara dan Bea Cukai Tarakan berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 23 kilogram menggunakan jalur laut di Perairan Muara Pekin, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dari pengungkapan kasus tersebut, dua pelaku masing-masing berinisial UW dan PU diamankan, keduanya merupakan pria kelahiran Filipina yang telah lama menetap di Malaysia.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula dari adanya informasi bahwa akan ada penyelundupan sabu yang dibawa oleh sarana pengangkut berupa kapal dari Semporna Malaysia menuju Kaltara.



Menindaklanjuti informasi tersebut Bea Cukai Tarakan, BNNP Kaltara dan Lantamal XIII Tarakan membentuk tim gabungan untuk melakukan pengintaian. “Selanjutnya pada Sabtu, (4/11/2023), tim gabungan menurunkan dua speedboat guna melakukan rangkaian patroli atau pengintaian di beberapa titik di perairan Tarakan dan Bulungan yang dicurigai akan dilaksanakan kegiatan serah terima sabu,” ucapnya, Rabu (8/11/2023).

Selanjutnya pada Senin, (6/11/2023) sekira pukul 09.30 Wita di Perairan Pangkalan Tias, Kabupaten Bulungan, tim gabungan mencurigai sebuah kapal ketinting bewarna hijau. Tim gabungan langsung mendekati untuk melaksanakan pemeriksaan

terhadap ABK yang berada di atas kapal tersebut. Dalam proses penyeragaman tersebut tiga pelaku yang merupakan awak kapal berusaha melarikan diri dengan melompat ke laut dan berenang setelah sebelumnya membuang barang bukti ke laut.

Tim gabungan langsung melakukan upaya pengejaran dan pencarian, atas upaya tersebut berhasil diamankan dua orang ABK terduga pelaku. Sementara satu orang pelaku berhasil kabur dan saat ini masih dalam tahap pengejaran. Dari pelaku tersebut, ditemukan 23 paket berisi 23 kilogram diduga sabu.

Askolani mengatakan penindakan yang dilakukan Bea Cukai Tarakan, BNNP Kaltara dan Lantamal XIII

Tarakan merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya (Community Protector). “Penindakan ini tidak lepas dari hasil kerjasama dan sinergi yang telah dibangun antara Bea

Cukai Tarakan, BNNP Kaltara dan Lantamal XIII Tarakan. Upaya kegagalan penyelundupan yang dilakukan kali ini, adalah bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba,” tutupnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika

## Kurang dari 2 Bulan, Tim Gabungan TNI AL, BNN, dan Bea Cukai Ungkap 38,3 Kg Sabu-sabu

**TARAKAN** - Tim gabungan yang terdiri dari Tim Second Fleet Quick Response Lantamal XIII Tarakan, BNNP Kaltara dan Bea Cukai Tarakan berhasil mengungkap kasus peredaran sabu seberat 38,3 kilogram dalam waktu kurang dari dua bulan atau 46 hari.

“Ini kedua kali dalam waktu kurang dari 46 hari pada saat penangkapan 21 September lalu dengan barang bukti 15,3 kilogram. Kali ini pengungkapan lagi seberat 23 kilogram,” ucap Komandan Lantamal XIII Laksamana Pertama TNI Deni Herman, Rabu (8/11/2023).

Deni mengungkapkan pengungkapan pada 21 September 2023 lalu, berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 15,3 kilogram di Pulau Keciak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dari pengungkapan kasus ini, tim gabungan berhasil membekuk tujuh orang pria. Namun setelah dilakukan pengembangan ditetapkan 4 tersangka yakni S (41), MT (27), SP (31) dan ZM (31).

Sementara penangkapan pada 6 November 2023, berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 23 kilogram di Perairan Muara Pekin, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dua pelaku masing-masing berinisial UW dan PU berhasil diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pengejaran. Keduanya merupakan pria kelahiran Filipina yang telah lama menetap di Malaysia.

“Penangkapan sabu 15,3 Kg yang



terjadi di Pulau Keciak letaknya 7 Nautical Mile (Nm) dari Tarakan. Penangkapan sabu 23 Kg pada 6 Nov 2023 di Perairan Muara Pekin letak 20 NM dari Tarakan,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa pelaku menggunakan pola yang hampir sama, yakni menyelundupan sabu ship to ship jalur laut menggunakan kapal atau speed. “Pola hampir sama, RV speed atau perahu dari Malaysia dengan speed lokal di tempat yang sama dan waktu yang sama,” ujarnya.

Deni menegaskan bahwa Lantamal XII bersama tim gabungan berkomitmen untuk terus mendukung

program pemerintah dengan memerangi narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkoba memerlukan kerja sama seluruh pihak sehingga diperlukan sinergitas Bersama.

“Keberhasilan tidak akan terjadi apabila tidak ada sharing seluruh pihak. Kalau kita lihat barang bukti 23 Kg. kalau 1 gram dipakai 5 sampai 8 orang artinya ada 150.000 generasi muda yang bisa hancur karena barang ini,” tutupnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



## Bupati Syarwani Kontrol Penyaluran CSR untuk Masyarakat

TANJUNG SELOR – Eksistensi perusahaan di setiap daerah, selain untuk ikut menopang pembangunan daerah, juga berimplikasi baik bagi masyarakat setempat.

Kontribusi perusahaan, tidak hanya sekedar menciptakan lapangan kerja seluasnya, tapi lebih dari itu, ada tanggung jawab sosial lainnya atau dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).

Pemkab Bulungan mendorong perusahaan untuk berkomitmen menyalurkan CSR bagi masyarakat di Bulungan. Hal itu diungkapkan Bupati Bulungan, Syarwani.

Dia katakan, pembangunan inklusif tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan bagaimana badan usaha, akademisi, masyarakat atau komunitas dan media bersatu untuk berkoordinasi dan berkomitmen mengembangkan potensi lokal yang ada, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Meski begitu, Syarwani mengapresiasi terhadap perusahaan yang telah menyalurkan tanggungjawab sosialnya selama ini. “Iya, kita apresiasi terhadap badan usaha yang telah komitmen menjalankan tanggung jawabnya dan menjadi hak masyarakat,” ungkap Syarwani, Rabu (7/11/2023).

Terhadap badan usaha yang belum menjalankan kewajibannya, pemerintah meminta adanya pro aktif masyarakat untuk melaporkan.

Sebelumnya, Pemda Bulungan telah menggelar rapat koordinasi (rakor) forum CSR Bulungan. Hal ini merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun Bulungan berdaulat pangan, maju dan sejahtera.

Apalagi berbicara tanggung jawab sosial lingkungan, kata di tidak hanya tentang melaksanakan program atau kegiatan pembangunan, melainkan juga mengedepankan unsur pemberdayaan masyarakat. “Sehingga



Bupati Bulungan Syarwani, ajak masyarakat kontrol penyaluran CSR.

menjadi kemandirian serta menjaga keberlanjutan di tahun yang akan datang,” bebernya.

Perusahaan, sambung Syarwani, berkewajiban membantu pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur, demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. “Kita perlu dan secara bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur di Bulungan,” pintanya.

Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, berupa pembangunan jalan di wilayah kecamatan. Pemda Bulungan, kata dia telah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltara supaya Pemprov Kaltara turut mendukung dan membantu peningkatan infrastruktur jalan di Bulungan.

Jika infrastruktur jalannya mulus, dapat membantu mobilisasi masyarakat dari kecamatan ke Ibu Kota Provinsi. Salah satu ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, berupa akses dari Kecamatan Tanjung Palas

Timur menuju Tanjung Selor, begitu pun sejumlah ruas jalan di kecamatan yang lain.

Maka perusahaan yang memiliki wilayah operasi di kecamatan, diharapkan turut berperan aktif. Termasuk membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan serta lingkungan masyarakat.

Hal tersebut, berlandaskan pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseeroan Terbatas. Jadi masyarakat tidak perlu meminta itu kepada perusahaan karena memang sudah menjadi hak daripada masyarakat itu sendiri.

“Masyarakat tetap perlu mengkritisi pelaksanaan bantuan dari perusahaan, sehingga penyaluran tepat sasaran,” ucapnya.

Disamping itu, juga dapat mewujudkan komitmen perusahaan. Maka program CSR yang merupakan kewajiban perusahaan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. (adv/tin/and)



Suasana pagelaran Berau Culture Festival.

## Harap Berau Culture Festival Masuk Kalender Pariwisata

**TANJUNG REDEB** - Pagelaran pawai bertajuk Berau Culture Festival berlangsung meriah. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai OPD dan paguyuban yang ada di Bumi Batiwakkal.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menilai, pagelaran tersebut merupakan kegiatan yang sangat menarik. Terlebih juga menjadi hiburan untuk masyarakat. "Saya harap dapat menjadi agenda tahunan, karena banyak dampak positif yang timbul," katanya.

Dirinya mendorong, Berau Culture

Festival masuk kalender pariwisata. Sebab membawa dampak positif terhadap perekonomian, baik pelaku salon maupun pelaku UMKM yang menjajakan jualan mereka di sepanjang jalan yang dilalui peserta.

"Saya setuju. Kalau bisa ke depannya lebih meriah lagi. Lebih banyak pesertanya," ujarnya.

Dilanjutkan Politikus Gerindra ini, festival tersebut dimintanya terus dipertahankan. Pasalnya, memiliki nilai lebih dalam sektor pariwisata.

"Ke depannya, jika bisa secara nasional. Ajak juga wisatawan dari luar

negeri, untuk bisa ikut meramaikan. Inikan unik, orang luar pakai baju adat kita. Mengenalkan kepada mereka juga budaya Berau," ujarnya.

Peri berharap, ke depannya, kegiatan ini bisa dilaksanakan lebih meriah lagi, dan lebih banyak atraksi yang ditampilkan. Dia mengistilahkan, Indonesia dalam Berau yang memiliki arti berbagai kesenian dan budaya yang ada di Indonesia, bisa ditampilkan pada festival tersebut. "Bukan tidak mungkin. Ini sangat bagus," tutupnya. (adv/and)

# APBD Berau 2024 Sentuh Rp 4 Triliun, Fraksi Demokrat Harap Pengelolaan Lebih Tertib

**TANJUNG REDEB** - Fraksi Partai Demokrat DPRD Berau menyetujui penetapan Raperda APBD Berau tahun 2024 menjadi Perda. Juru bicara Partai Demokrat, Falentinus Keo Meo mengatakan, dengan ditetapkannya R-APBD 2024 menjadi Perda, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mesti mengelola dengan baik.

Pihaknya menilai, dari tingginya APBD Kabupaten Berau 2024 nanti, yakni sebesar Rp 4 triliun lebih, diharapkan pemerintah daerah serta OPD agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah lebih tertib.

“Dalam realisasi anggaran nantinya, Pemkab Berau diharapkan bisa taat pada peraturan dan melaksanakan dengan efektif dan efisien,” ujarnya.

“Sehingga bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat secara merata. Juga harus ekonomis, transparan dan bertanggung jawab,” tandasnya. (adv/and)



Falentinus Keo Meo saat menyerahkan notulen R-APBD.

# Pikir Seribu Kali untuk Gabung ke Kaltara



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

**TANJUNG REDEB** - Wacana penggabungan Berau ke Kaltara menuai kontroversi. Sebab, dalam survei disampaikan 70 persen masyarakat Bumi Batiwakkal mengkehendaki hal tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah meminta pemerintah daerah untuk berpikir seribu kali sebelum memutuskan bergabung dengan Kaltara. Pasalnya, Berau memiliki banyak keuntungan jika tetap menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Karena, menurut saya lebih menguntungkan bergabung dengan Kaltim daripada Kaltara,” ungkapnya.

Dijelaskannya, wacana Berau gabung dengan Kaltara memang boleh saja terjadi. Kaltara juga mempunyai hak untuk meminta Berau bergabung. Apalagi potensi dan posisi strategis Berau dengan pariwisatanya sebagai sektor unggulan tentu menguntungkan.

“Tetapi kenapa tidak dari dulu? Untuk saat ini dengan APBD dan Bankeu kita yang signifikan, jika kita beralih ke Kaltara apa untungnya? Jangan sampai malah kita yang menyumbang. Jadi ini perlu dikaji lebih dalam,” tegasnya.

Diakuinya, memang jika dilihat secara historis, sosial serta budaya, Berau dan Kaltara memiliki keterkaitan satu sama lain. Jarak yang dekat ke Bulungan daripada Samarinda juga menjadi salah satu faktor pendukung yang cukup menguntungkan buat Kaltara.

“Tapi aspek-aspek lain kan harus diperhatikan. Apalagi kita merupakan daerah dengan destinasi wisata unggulan di Kaltim dan akan menjadi destinasi wisata unggulan di IKN,” terangnya.

Dengan melihat potensi Berau yang sangat menguntungkan Kaltara itu, tambah Syarifatul, pemerintah daerah harus benar-benar matang dalam mengambil keputusan. Tujuannya, agar Berau tidak kecewa di kemudian hari.

“Kalau mau memutuskan sesuatu kan harus ada win-win solutionnya. Apa yang mau kita dapat,” tutupnya. (adv/and)

# Pembangunan Sirkuit Jangan Sekadar Janji

**TANJUNGREDEB** - Janji politik bupati terkait pembangunan sirkuit diminta Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga dipenuhi. Terlebih hal tersebut sudah lama diwacanakan.

Dia membeberkan, hingga kini anggaran untuk perencanaan pembangunan sirkuit belum ada. Padahal, di setiap ajang balap motor, selalu keluar bahasa akan membangun sirkuit. "Hal itu sama saja membohongi masyarakat yang merupakan pecinta balap. Mengenai sirkuit ini sudah lama diteriakkan, tetapi belum ada realisasinya sampai sekarang," katanya.

Menurut Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pemicu maraknya aksi balap liar dikarenakan tidak ada wadah untuk menyalurkan hobi mereka. "Sekarang kan banyak aksi balap liar. Saya rasa karena itu kurang wadah saja, jika sudah ada wadah, mereka pasti memilih jalur aman," ucapnya.

Saga menambahkan, pembangunan sirkuit sudah janji politik seorang bupati. Tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Hal itu menurutnya, akan membuat para penggemar dunia balap kecewa. "Seharusnya bisa direalisasikan. Apalagi mengenai hal ini sudah janji," bebarnya.

Dirinya berharap agar ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk bisa memprioritaskan pembuatan sirkuit, agar anak muda di Bumi Batiwakkal tidak balapan liar di jalan umum yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain.

"Wacana pembuatan sirkuit sudah sangat lama saya dengar, tetapi hingga detik ini belum ada realisasinya," tandasnya. (adv/and)



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga

# Jangan Ada Perpecahan dalam Pesta Demokrasi 2024



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

**TANJUNG REDEB** - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta masyarakat tidak mudah termakan berita bohong. Dirinya menilai, masyarakat berperan besar dalam menjaga kondusifitas di lingkungannya. "Selain itu, peran masyarakat juga untuk memberi pemahaman kepada yang belum melek politik," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan agama merupakan isu yang riskan. Maka dari itu, masyarakat diminta tidak mudah terhasut oleh oknum-oknum yang menyebar informasi tidak benar. "Terkait agama, hal itu merupakan isu yang gampang digoreng. Masyarakat harus cerdas, jangan sampai terpecah belah," tuturnya.

Madri mengajak masyarakat untuk bersama menjaga persatuan dan kesatuan. Warga didorong untuk berpikir dewasa dengan tidak menjatuhkan satu sama lain. "Kalau tidak dewasa dalam berpikir hanya emosi dan kepentingan kelompok itu yang membuat cerai berai," jelasnya.

Politikus NasDem ini berharap, masyarakat bisa memilih pemimpin yang bisa membawa Berau lebih baik di tahun emas. "Politik yang sehat, merupakan politik yang mampu menyatukan masyarakat seluruhnya. Saya sekali lagi mengingatkan, masyarakat sudah pintar. Jangan mudah terpengaruh," tutupnya. (adv/and)



ADE/MKR

Armada yang tersedia di PMK.

## Pemadam Kebakaran Tarakan Dapat Armada Baru di Tahun 2024

**TARAKAN** - Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Tarakan bakal mendapatkan armada baru berupa Fire Truck di tahun 2024. Armada baru sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran di Kota Tarakan. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang PMK Eko Puguh Santoso di Tarakan, belum lama ini.

“Alhamdulillah kami mendapatkan informasi terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Penentuan Pelaporan Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk tahun anggaran 2024. Kami mendapatkan alokasi program kegiatan dan anggaran untuk pengadaan unit kendaraan operasional PMK. Kalau dari itung-itungan, minimal PMK akan mengadakan satu armada tapi kalau dimungkinkan bisa dua,” ucapnya.

Eko mengatakan Fire Truck merupakan armada yang sangat dibutuhkan PMK. Dijelaskannya, armada tersebut menjadi prioritas PMK sebab memiliki tekanan tinggi untuk menembak air.

“Supply truck juga bisa, tapi sebenarnya mobil penembak air yang asli itu Fire Truck karena tekanannya

sangat tinggi,” katanya.

Menurutnya, penambahan armada baru ini sangat diperlukan seiring dengan tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan infrastruktur. Tuntutan dan kemajuan itu, kata Eko, harus diimbangi dengan armada sehingga dapat melindungi Tarakan dari ancaman kebakaran. Pengadaan armada ini nantinya juga akan dilengkapi dengan peralatan pendukung.

“Kami perhitungan juga dengan peralatan pendukung. Karena dengan itu, kami berharap unit kendaraan langsung bisa di fungsikan. Karena kalau hanya ada kendaraan tapi tidak ada selang dan lain-lain untuk apa,” ucapnya

Saat ini, PMK Tarakan hanya memiliki 15 armada dengan kondisi 9 kendaraan siap tempur dan sisanya masih dalam perbaikan. Untuk itu, penambahan armada baru ini sangat penting untuk menunjang tugas PMK saat terjadi kebakaran. “Mudah mudahan ini bisa terealisasi dan prosesnya bisa berjalan baik, aman, selamat. Mudah mudahan bisa memberikan banyak nilai manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat,” u-

capnya

Selain armada, PMK juga mengalami kendala terkait minimnya SDM. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya pekerja yang memiliki kualifikasi kemampuan dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran. “PMK tidak memiliki pekerja dengan kemampuan kualifikasi dalam investigasi kebakaran. Tidak hanya itu, PMK kekurangan personel yang memiliki kompetensi di bidang administrasi,” ungkapnya.

PMK saat ini hanya memiliki 85 personel yang terdiri dari petugas regu piket yang tugasnya berjaga-jaga jika sewaktu waktu ada kebakaran. Kemudian petugas administrasi, dan petugas yang intens melakukan edukasi dan pelatihan. Kurangnya personel menyebabkan mereka kesulitan merespons ketika terjadi kebakaran dengan jarak yang jauh. Kata Eko, seyogyanya dengan wilayah yang cukup luas ini, PMK Tarakan harus memiliki ratusan petugas. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



Kantor Gubernur Kaltara, UMP Kalimantan Utara diproyeksikan naik.

# Proyeksi UMP Kaltara Naik

TANJUNG SELOR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara), memproyeksikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltara pada tahun 2024 mengalami kenaikan.

Kepala Disnakertrans Kaltara, Haerumuddin mengungkapkan, UMP 2024 ditetapkan oleh gubernur paling lambat 21 November. Sedangkan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) ditetapkan selambatnya 26 November.

Pasalnya, sebelum ditetapkan terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan melibatkan lintas sektor seperti Dewan Pengupahan Kaltara terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, pekerja dan pengusaha.

“Menegenai proyeksi kenaikan UMP Kaltara kemungkinan naik,” ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Hal itu, jika berkaca dari beberapa tahun sebelumnya. UMP selalu mengalami kenaikan. Kendati demikian, Haerumuddin belum bisa memas-

tikan untuk persentasenya. Sebab, belum ada formula perhitungan UMP dari pemerintah pusat.

Pihaknya, memilih untuk menunggu formula perhitungan dari pemerintah pusat yang kemudian jadi tolok ukur penetapan UMP tingkat Provinsi. Ada beberapa poin yang menjadi acuan dalam penerapan UMP.

“Seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serapan tenaga kerja dan penghasilan rata-rata pekerja,” tukasnya.

Secara terpisah, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Bulungan, Agustinus menuturkan belum menerima undangan resmi dari pemerintah terkait pembahasan UMP Kaltara.

“Kita belum mendapatkan undangan, mengenai pembahasan UMP tingkat Provinsi,” tuturnya.

SBSI Bulungan berharap, penetapan UMP menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di daerah. Dengan tetap berlandaskan pada

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Khususnya, untuk penetapan UMK Bulungan.

Karena, UMK Bulungan tertinggal jauh dengan Tarakan. Menurutnya, ada penghitungan regulasi yang salah. Hal inipun tidak diindahkan oleh gubernur.

Sejak 2015, kata dia UMK Bulungan dibawah Kebutuhan Hidup Kayak (KHL) SBSI telah melakukan kajian. Tetapi, gubernur tidak mau menandatangani.

“Jika regulasi itu masih digunakan maka sampai kapanpun, UMK Bulungan jauh dari KHL. Oleh karena itu, diharapkan ada peninjauan kembali,” harapnya.

Berkaitan hal tersebut, SBSI Bulungan mengaku telah melakukan pembahasan bersama dengan Pemda Bulungan. Mereka mengakui bahwa ada ketertinggalan pada 2015. (tin/and)

Editor: Andhika

# Pengerjaan Jalan Lingkar Krayan Dilanjutkan Tahun 2023

TANJUNG SELOR - Perbaikan infrastruktur jalan terus dikebut menjelang akhir tahun. Salah satunya rencana perbaikan jalan Lingkar di Krayan Kabupaten Nunukan, oleh Pemprov Kaltara.

Kepala Dinas PUPR Kaltara, Helmi saat dikonfirmasi menjelaskan, soal perbaikan Jalan Lingkar di Krayan Nunukan, dalam waktu dekat akan dilakukan tinjauan ke lapangan.

"Iya, dalam waktu dekat saya akan tinjaulangsung ke lapangan," ujarnya, Rabu (7/11/2023).

Rencananya, dari tinjauan langsung ke lapangan akan mengoptimalkan semua alat berat yang ada di lokasi. "Saya rencana ke sana (Krayan red) mau ketemu dengan pemilik alat, jadi setiap titik itu masing-masing ada yang mengerjakan," tukasnya.

Dan itu akan dimanfaatkan semua alat berat yang ada pada semua titik. Soal jumlah alat yang digunakan telah dilakukan perhitungan dan dipastikan setiap titik itu ditempatkan alat berat sehingga dapat memudahkan pekerjaan.

"Mulai dari Krayan Long Bawan-Long Layu, nilainya sekitar 5 miliar termasuk dari Long Layu- Binuang juga ada, dan sudah kita laksanakan," tuturnya.

Makanya, tinjauan lapangan nantinya akan bertemu langsung dengan para pemilik alat berat. Dan diminta untuk segera dilakukan mobilisasi saat ini juga tengah bergerak menuju ke lokasi.

"Tapi, untuk koordinir kepada pemilik alat, kan harus kita temui juga kan, soal kesepakatannya nanti, sehingga harus turun ke lokasi," jelasnya.

Sementara, untuk pengerjaan fisik di lapangan sejauh ini belum dilaksanakan, karena masih menunggu dikeluarkan anggaran perubahan.

"Kemarin itu, kita mau langsung dan ternyata karena waktu, kita menunggu anggaran perubahan. Dan sampai hari ini anggaran perubahan belum dapat nomor register dari Kementerian," ucapnya.

Jadi proses lelangnya sebagai pelaksana sudah dilakukan, nanti begitu memasuki kontrak baru dilaksanakan. Makanya, dalam waktu dekat bertemu dengan pemilik alat berat bertujuan untuk percepatan



Jalan lingkar Krayan terpantau rusak parah.

pembangunan.

Untuk material, dipastikan aman karena hanya mengambil di sekitaran lokasi, karena sistem pengambilan material tinggal dibuang rumput-

ya kemudian disisihkan dengan batu belah. (tin/and)

Editor: Andhika



ANNIVERSARY  
MEDIA  
KALTIM.com  
T3RDEPAN  
14 JULI 2008 - 14 JULI 2023



TERVERIFIKASI  
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**

*Lebih Dekat dengan Satu Klik*



# KAKEK 64 TAHUN CABULI ANAK DI BAWAH UMUR

**BACA HALAMAN 2**



**BADAK LNG RAIH  
PENGHARGAAN ASIA  
SUSTAINABILITY  
REPORT RATING 2023  
BACA HALAMAN 35-36**

# Kakek 64 Tahun Cabuli Anak di Bawah Umur

## Untuk Melancarkan Aksinya, Korban Diberi Uang Rp 10 Ribu

**SAMARINDA** - Reskrim Polsek Sungai Kunjang kembali mengamankan pria berinisial SPR (64) seorang penjaga malam, karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak usia 10 tahun. Pelaku di tangkap di Jalan Jakarta 1, kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang.

Kapolsek Sungai Kunjang, Kopol Zainal Arifin, SH mengatakan bahwa benar pihaknya mengamankan pelaku pada Senin (6/11) malam.

Kapolsek membeberkan, pelaku mengaku melakukan perbuatan cabul tersebut sejak akhir tahun 2021 atau sejak korban masih duduk di bangku SD kelas II.

Namun saat naik ke kelas III hingga terakhir kali ter-sangka melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari Jumat (27/10/2023) sekira pukul 12.00 Wita. Pelaku melakukan perbuatan tersebut terjadi di Jalan Jakarta I, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang dan di jalan raya sepanjang Jalan Jakarta I, Kelurahan Loa bakung, Kecamatan Sungai Kunjang.

"Untuk perbuatan cabul yang pertama kali dilakukan pelaku ketika berada di rumah korban, saat ada kesempatan atau situasi aman. Dalam artian ibu Korban tidak ada di rumah atau berada di dalam kamar. Pelaku kemudian melakukan perbuatan cabul tersebut," kata Kapolsek.

Adapun pelaku sering melakukan perbuatan cabul tersebut tidak lama dikarenakan takut aksinya diketahui oleh ibu korban. Selain itu pelaku juga melakukan perbuatan cabul tersebut di jalan raya.

"Pelaku melakukannya saat menjemput korban pulang sekolah, di mana korban dan pelaku berbongcengan dengan menggunakan sepeda motor. Saat jalaanan sepi kemudian pelaku melakukan aksinya cabul tersebut. Karena jarak rumah tidak terlalu jauh dan jalannya banyak yang rusak sehingga pelaku hanya melakukan 1 kali saya perbuatan cabul saat di jalan," beber Kapolsek.

Dikatakan, pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Namun pelaku biasanya memberikan uang sebesar Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu kepada korban sebelum melakukan perbuatan cabul kepada korban.

"Saat ini pelaku sedang dalam Pemeriksaan oleh unit Reskrim Polsek Sungai Kunjang," jelas Kapolsek.

Atas Perbuatannya Pelaku Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e Sub 82 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari





**BPSDM KALTIM EVALUASI LATSAR CPNS,  
FOKUS PERKEMBANGAN  
KINERJA ASN**



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP saat memberikan sambutan evaluasi latsar di Berau.

## BPSDM KALTIM EVALUASI LATSAR CPNS, FOKUS PERKEMBANGAN KINERJA ASN

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dasar (Latsar) calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi mengungkapkan bahwa hal ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari program pelatihan terhadap peningkatan kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini dikatakan Nina Dewi di Ballroom Hotel Exclusive di Tanjung Redeb. Kabupaten Berau pada Selasa (7/11/2023).

"Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana dampak dari program pelatihan dasar yang telah dilakukan pada 2022 lalu," ujarnya.

Kegiatan evaluasi pasca Latsar CPNS juga dapat sebagai media untuk mengetahui perkembangan peserta alumni Latsar CPNS

dalam implementasi pelatihan.

"Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan alumni pelatihan pasca latsar, dalam kegiatan pelatihan sebagai pemenuhan data dan Informasi tentang implementasi pelatihan yang sudah dilaksanakan," jelasnya.

Lebih lanjut, Nina Dewi mengatakan, evaluasi pasca pelatihan bukan saja sebagai upaya untuk mengetahui seberapa bermanfaat pelatihan tersebut terhadap Individu, tim ataupun organisasi. Akan tetapi juga sebagai sebuah rangkaian siklus dinamis dan berkesinambungan dalam memberikan umpan balik pada proses perbaikan dan penyempurnaan program pelatihan.

Diketahui, evaluasi pelatihan dasar pasca CPNS 2023 ini diselenggarakan oleh BPSDM

Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Berau. Dan peserta dari kegiatan ini berasal dari alumni latsar CPNS tahun pelatihan 2022.

Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti evaluasi Latsar CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau pada Selasa (7/11/2023) tersebut berjumlah 151 Peserta.

Dalam kegiatan ini akan ada diskusi dan tanya jawab terkait perkembangan alumni pasca Latsar dan dipandu langsung oleh Widyaiswara BPSDM Provinsi Kaltim Dr.H. Muhammad Jauhar Effendi, M.Si dan Badi' Zulfa Nihayati, S.Psi, M.Sc., M.AP. **(ADV/Han/BPSDMkaltim)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP saat ditemui media Kaltim beberapa hari yang lalu.

## SESUAI UU ASN TERBARU, ASN WAJIB IKUTI PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

**SAMARINDA** - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP mengungkapkan bahwa pengembangan kompetensi kini bukan lagi hanya sekadar hak bagi ASN. Akan tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara.

"Hal ini, sesuai dengan revisi undang-undang ASN tahun 2014 dan Undang - Undang ASN no 20 tahun 2023, Jadi mau tidak mau suka tidak suka kita harus melaksanakannya," terangnya.

Menurut Nina, dengan adanya UU ASN terbaru ini, akan menjadi tanggung jawab BPSDM Kaltim untuk mengembangkan aparatur sipil negara (ASN) dan harus memper-

siapkan diri dalam penjadwalannya.

"Ini jadi tanggung jawab bagi BPSDM Kaltim untuk menyediakan pelatihan dan menjadi kewajiban bagi ASN untuk mengikuti, sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban Jam Pelatihan 20 jam bagi PNS dan 25 Jam bagi PPPK," tutupnya.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab penyedia pelatihan bagi ASN, BPSDM Kaltim memiliki tempat pelatihan yang cukup luas dan lengkap beserta dengan asrama yang memiliki jumlah tempat tidur yang memadai.

Saat ini fasilitas yang dimiliki oleh BPSDM Kaltim dalam melaksanakan kegiatan pelatihan cukup memadai, dengan jumlah fasilitas ruang belajar di 2

gedung terpisah dan ruang kelas berjumlah 9 ruangan kelas di masing-masing gedung. Kondisi ini masih cukup untuk melayani para peserta pelatihan selama ini.

Sedangkan untuk asrama BPSDM Kaltim memiliki 4 gedung asrama, setiap gedung ada 25 kamar, dengan kapasitas tempat tidur berbeda pergedung, gedung A dan B memiliki masing-masing 75 tempat tidur sedangkan gedung C dan D memiliki masing-masing 50 tempat tidur, jadi secara keseluruhan fasilitas asrama memiliki 250 tempat tidur yang berada di 4 gedung asrama tersebut. **(ADV/Han/BPSDMkaltim)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Foto bersama dalam acara evaluasi Paska Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim kelas Kabupaten Berau

## 151 CPNS Ikuti Evaluasi Paska Latsar BPSDM Kaltim Kelas Berau

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melaksanakan evaluasi Paska Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim kelas Kabupaten Berau.

"Acara ini merupakan evaluasi pasca Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2022 oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur bagi peserta yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Berau, sebanyak 151 orang," kata Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara.

Kegiatan ini dihadiri alumni peserta beserta mentor atau atasan langsungnya. Kegiatan ini bertempat di Ballroom Hotel

Exclusive di Tanjung Redeb.

Dalam kegiatan para peserta melakukan pengisian quisioner menggunakan Microsoft Form. Setelah itu juga dilakukan wawancara dan diskusi berfokus pada "Perubahan Sikap Perilaku" dan "Dampak Pelatihan" terhadap alumni peserta pelatihan.

"Saya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau atas segala bentuk dukungan sehingga acara ini dapat terselenggara sesuai dengan harapan," tutupnya. **(ADV/Han/BPSDMkaltim)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Tampilan acara Webinar dengan Tema "Leadership Development and Performance Management" secara virtual atau online.

## LEWAT WEBINAR, BPSDM KALTIM OPTIMIS MAMPU DONGKRAK KUALITAS ASN

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali sukses menyelenggarakan pelatihan Webinar dengan Tema "Leadership Development and Performance Management" secara virtual atau online.

Acara yang disiarkan secara live pada Senin (6/11/2023) lalu, melalui platform digital yakni akun YouTube milik BPSDM Kaltim dan aplikasi Zoom Meeting tersebut diikuti sebanyak 482 peserta yang bukan hanya Aparat Sipil Negara (ASN) tetapi juga termasuk masyarakat umum.

Tampil sebagai Narasumber, Sekretaris dari Lembaga Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ. Acara juga dipandu Moderator Widyaswara

BPSDM Kaltim Yoyok Setyo Langgeng MSi.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti dalam sambutannya sekaligus membuka acara mengatakan acara ini merupakan wujud komitmen BPSDM Kaltim dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

"Acara ini merupakan wujud komitmen kami dalam pengembangan jiwa kepemimpinan yang kuat pada ASN dalam meningkatkan kinerja organisasi," ujarnya.

Melalui BPSDM Kaltim CorpU, Rina mengatakan akan tetap optimis untuk meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi bagi ASN maupun masyarakat umum, melalui berbagai metode pelatihan salah satunya secara

online dengan menggelar acara webinar.

"Besarnya harapan kami agar bapak ibu bisa menyerap dengan sebaik-baiknya dari kegiatan webinar ini. Kami juga berterima kasih atas kesediaannya bapak ibu terutama kepada narasumber, moderator dan seluruh peserta yang bersedia bergabung dalam kegiatan webinar ini. Semoga bapak ibu terus dapat berperan aktif bersama kami membangun sumberdaya manusia di Kalimantan Timur," tutupnya.

Diketahui, acara webinar ini diselenggarakan secara terbuka, bisa diikuti ASN seluruh Indonesia dan masyarakat umum, dan bagi peserta yang terdaftar bisa mendapatkan E-Sertifikat. **(ADV/Han/BPSDMkaltim)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



dari Kiri : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, Panitia Pelatihan JFAK Tajuddin Noor, SE, beserta Jajarannya dan Perwakilan Peserta.

## BPSDM KALTIM SEBUT JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN TERFAVORIT DI INDONESIA

**SAMARINDA** - Berdasarkan data Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA LAN) selaku unit Pembina JFAK, jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) meningkat signifikan di tahun 2022. Tercatat di tahun 2019 ASN JFAK berjumlah 450 orang sedangkan di tahun 2022 menjadi 7.465 orang.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, menyebutkan hal ini dikarenakan banyak ASN menjadikan JFAK adalah jabatan terfavorit.

"Peningkatan ini sangat signifikan, sehingga bisa dikatakan

JFAK adalah jabatan terfavorit, yang dilirik ASN di Indonesia," ungkapnya saat memberikan sambutan Pembukaan Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan BPSDM Kaltim di Hotel Fugo Samarinda pada Selasa (7/11/2023).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berkualitas.

"Ini merupakan tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik kita yang berkualitas," pungkasnya.

Diketahui, Seorang Analis Kebijakan diwajibkan memiliki

kompetensi analisis, kompetensi politis, dan kompetensi spesialis sesuai dengan bidang penugasan ataupun kepakaran. Pada kompetensi politis, bagi JFAK hasil penyetaraan jabatan bukanlah hal yang menyulitkan, karena erat hubungannya dengan jabatan sebelumnya.

"Analisis Kebijakan juga harus mengembangkan kompetensi manajemen diri dan tim agar dapat terus berkolaborasi aktif dengan jabatan administrasi maupun jabatan fungsional lain yang terkait. Kolaborasi sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian pekerjaan" tutup Rina. **(Adv/Han/BPSDMkaltim)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, saat menyampaikan sambutan pembukaan Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota Se-Kalimantan Timur pada Selasa (7/11/2023)

## ANALIS KEBIJAKAN HARUS MAMPU JADI AGEN KEBIJAKAN PUBLIK BERKUALITAS

**SAMARINDA** - Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, mengatakan Aparat Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) harus menjadi agen perubahan kebijakan publik yang berkualitas.

Hal ini disampaikan oleh Rina saat membuka acara Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di Hotel Fugo, Selasa (7/11/2023).

Analisis Kebijakan, dikatakan oleh Rina, idealnya harus hadir sebagai agen dalam membantu membuat kebijakan pemerintah yang inovatif berbasis pada bukti sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam kebijakan pemerintah yang bisa menimbulkan reaksi masyarakat atau publik.

"Analisis Kebijakan harus menjadi agen

yang menganalisis kebijakan pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah," ujarnya.

Sebagai analisis kebijakan, ASN JFAK memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perumusan analisis kebijakan pemerintah, terutama dalam memberikan solusi agar kualitas kebijakan publik memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat luas.

"Bapak dan Ibu bertanggung jawab besar terhadap perumusan analisis kebijakan pemerintah, dan kita hidup dizaman dgn perubahan yang sangat cepat dan sebagai JFAK diharapkan siap menghadapi tantangan dengan pemahaman mendalam dan solusi yang sesuai," pungkasnya. **(ADV/Han/bpsdm-kaltim)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Laporan Panitia Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang dibacakan Tajuddin Noor, SE.

## BPSDM KALTIM GELAR PELATIHAN ANALIS KEBIJAKAN BAGI ASN JABATAN FUNGSIONAL SE-KALTIM

**SAMARINDA** - Demi mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparat Sipil Negara (ASN) dalam analisis kebijakan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota Se-Kalimantan Timur pada Selasa (7/11/2023).

Acara pembukaan diselenggarakan di Lantai 5 Ruang Serbaguna Hotel Fugo.

Dalam laporan panitia penyelenggara yang dibacakan Analis Pengembangan Kompetensi BPSDM Kaltim, Tajuddin Noor menyebutkan jumlah peserta yang mengikuti acara berjumlah 40 peserta dan akan diselenggarakan tiga hari dari tanggal 7 - 11 November 2023.

"Pelatihan JFAK diikuti oleh 40 peserta dari ASN Jabatan fungsional yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provin-

si, Kabupaten dan Kota," terangnya.

Tajuddin juga menyebutkan pelatihan JFAK menggunakan metode pembelajaran orang dewasa. Dengan metode ini, Tajuddin berharap peserta akan mampu aktif melalui komunikasi dua arah dengan mengombinasikan ceramah tanya jawab dan diskusi kasus secara berkelompok.

"Semoga para peserta bisa memahami setiap materi yang disampaikan dan mampu menambah kualitas para peserta JFAK yang mengikuti pelatihan ini," pungkasnya.

Selanjutnya acara dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, dan setiap peserta yang mengikuti pelatihan JFAK sampai selesai akan diberikan sertifikat pelatihan. **(ADV/Han/bpsdmkaltim)**

**Peserta : Hanaf**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP, saat memberikan sambutan pada acara penutupan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 79 dan 88 Kabupaten Mahulu.

## BPSDM KALTIM TUTUP KEGIATAN ORIENTASI PPPK ANGKATAN 79 DAN 80

**SAMARINDA** – Demi menciptakan kualitas guru di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mahulu, telah melakukan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 79 dan 88 Kabupaten Mahulu.

Acara penutupan yang diselenggarakan pada Jumat (3/21/2023) pukul 14.00 Wita, bertempat di gedung aula utama BPSDM Kaltim jalan HAM Rifadin Loa Janan Ilir Samarinda Kota. Acara ini diikuti 71 peserta dari guru-guru sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu.

Hadir dalam penutupan tersebut antara lain Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, Asisten III Bupati Kabupaten Mahulu Kristina Tening, Kepala BKPSDM Kab Mahulu Wenefrida Kayang, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, jajaran BKPSDM Kabupaten Mahulu, dan para peserta.

Dalam sambutan Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi mengatakan sangat mengapresiasi atas semua peserta yang telah mengikuti kegiatan orientasi PPPK di kampus yang kerap disebut Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami, I.

"Kami sangat mengapresiasi sekali atas kerjasamanya antara BPSDM Kaltim dan Kabupaten Mahulu yang sama-sama menyukseskan acara orientasi PPPK ini," ungkapnya.

Kegiatan orientasi PPPK dikatakan oleh Kepala BPSDM Kaltim sangat penting dan saat ini sudah dibuat aturan yang mewajibkan Aparat Sipil Negara termasuk PPPK untuk melakukan pengembangan diri.

"Bagi ASN itu wajib untuk melakukan pelatihan, karena ini diwajibkan demi pengembangan ASN," pungkasnya.

Lebih lanjut, Nina Dewi berharap semua peserta yang telah

mengikuti orientasi PPPK bisa mengembangkan diri untuk terus berinovasi.

"Setelah ini terus mengembangkan diri," tutupnya.

Sementara itu, Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh dalam sambutannya sekaligus menutup acara ini mengucapkan terima kasih kepada BPSDM Kaltim atas semua fasilitas dan penyediaan pelatih atau Widyaswara yang sangat berkualitas untuk mengembang kemampuan PPPK mahulu kali ini.

"Pemerintah Kabupaten Mahulu mengucapkan terima kasih atas kerjasama untuk mengembangkan SDM para PPPK kali ini. Semua ASN PPPK yang mengikuti Orientasi PPPK kali ini mayoritas adalah guru sekolah. Saya berharap semua guru yang mengikuti orientasi ini semoga menjadi penguat kualitas SDM guru di Mahulu agar bisa bersaing dengan guru diluar kabupaten mahulu," ujarnya. **(ADV/Han/bpsdmkaltim)**

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kabupaten Mahulu yang ditandatangani Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi dan Kepala BKPSDM Kabupaten Mahulu Wenefrida Kayang dan disaksikan Asisten III Bupati Kabupaten Mahulu Kristina Tening.

## KEMBANGKAN SDM, BPSDM KALTIM TEKEN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BKPSDM MAHULU

**SAMARINDA** - Untuk menyukseskan program-program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali tandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi dan Kepala BKPSDM Kabupaten Mahulu Kepala BKPSDM Kabupaten Mahulu, Wenefrida Kayang usai acara penutupan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 79 dan 88 Kabupaten Mahulu.

Acara ini digelar di gedung

aula utama BPSDM Kaltim di jalan HAM Rifadin Loa Janan Ilir Kota Samarinda pada Jumat (3/11/2023)

Kepala BKPSDM Kabupaten Mahulu juga mengapresiasi atas kerja sama dengan BPSDM Kaltim untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Mahakam Ulu.

"Kami sangat mengapresiasi sekali atas kerja samanya. Tentu kami sangat membutuhkan BPSDM Kaltim, sebagai wadah pengembangan SDM ASN, dengan fasilitas yang lengkap dan Widyaswara nya juga sangat berkualitas dan berpengalaman dalam memberikan materi betul-betul tidak ada kekurangan di sini," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, mengatakan kerja sama ini penting dilakukan karena akan banyaknya dilakukan pelatihan untuk PPPK yang di wilayah

kabupaten Mahakam ulu.

"Tentunya orientasi PPPK untuk Mahakam ulu terus akan dilakukan untuk mencetak para guru yang ada di Mahakam Ulu, tahun ini sudah dilakukan tahun depan pasti ada lagi yang akan diagendakan untuk orientasi PPPK," katanya.

Tidak lupa, Nina dewi juga berterima kasih atas penandatanganan PKS tersebut, dan Dia berharap hubungan yang telah terjalin akan mampu meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Mahulu.

"Tentunya kita sangat berterima kasih sekali kepada Kabupaten Mahakam Ulu, karena kerjasama yang telah dilakukan, kolaborasi dan bersinergi dengan BPSDM Kaltim dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Mahakam hulu," tutupnya. ([ADV/Han/bpsdmkaltim](#))

**Pewarta : Hanafi**

**Editor : Nicha Ratnasari**

## Informasi Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra



Umur Tanaman (Tahun)

Rp Harga TBS (Rp/Kg)

3	1.917,85
4	2.049,33
5	2.058,14
6	2.079,43
7	2.091,39
8	2.107,53
9	2.149,04
>10	2.174,53

Harga CPO

Rp. 10.532,27



Harga Kernel

Rp. 4.747,28

Update : Oktober Periode II (16-31 Oktober 2023)

@disbunkaltim @disbun.kaltimprov.go.id

**KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA**

**DINAS PERKEBUNAN**  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Minggu Ke III**  
BULAN:  
Oktober 2023

**SIPASBUN**  
SISTEM INFORMASI PASAR PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN

KOMODITAS	PETANI/ PRODUSEN	PENGECEP/ PENGUMPUL	Indikasi Karet	
<b>Karet</b>	Rp.8.500 /kg K3 50-55%	Rp.12.000/Kilo	Indikasi Karet K3 100%	Rp.21.642/kg
<b>Lada Putih</b>	Rp.55.000 /kg	Rp.97.000 /kg	Indikasi Karet K3 85%	Rp.18.396/kg
<b>Kelapa Tua</b>	Rp.5.700 / bj	Rp.2.200/bj	Indikasi Karet K3 50%	Rp.9.200/kg
<b>Kelapa Muda</b>	Rp.8.700 / bj	Rp.9.500 / bj	TBS Kelapa Sawit Penetapan Harga Provinsi Bagi Pekebun Bermitra Periode II (16 sd 30) bulan September 2023 Berdasarkan Umur Tanaman	
<b>Biji Kakao</b>	Rp.28.000 / kg	Rp.32.000 / kg	Harga TBS Umur >10 Thn Rp.2.198,63/kg	
<b>Gula Merah Aren</b>	Rp.28.500 / kg	Rp.30.200 / kg	turun Rp.22,6 atau 1,0% dari periode sebelumnya	

HARGA RATA-RATA KOMODITI PERKEBUNAN KABUPATEN/KOTA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan & kumbagai Kompeten  
Inovasi, loyal, integritas & kolaborasi

**DINAS PERKEBUNAN**  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**INFORMASI HARGA**  
**INDIKASI KARET**  
Tanggal 7 November 2023

Informasi Harga Indikasi Karet Provinsi Kalimantan Timur Berbagai Tingkatan Kadar Karet Kering (K3)

Dasar Perhitungan Harga Indikasi Karet adalah Harga SICOM (Singapore Commodity)  
Hari ini pada Technically Specified Rubber (TSR20)/ Standard Indonesian Rubber (SIR20)

Harga SICOM hari ini : 146,8 US Cent  
Kurs Rupiah Kisaran : RP.15.692  
Harga Dasar / FOB : RP.22.035 X 85%  
RP.19.580 **TURUN 0,3%**

**KONDISI KARET**

	Harga / kg
Harga Jalan Pabrikasi K3 100%	Rp. 18.000 - Rp. 19.000
HARGA KARET KERING STOK GUDANG 15 HARI LEDIH K3 70% - 75%	Rp. 13.750 - Rp. 14.750
HARGA KARET KERING STOK GUDANG K3 65% - 69%	Rp. 12.800 - Rp. 13.600
HARGA KARET KERING STOK GUDANG TINGKAT PETANI/UPPD K3 60% - 64%	Rp. 11.800 - Rp. 12.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI / UPPD K3 55% - 59%	Rp. 10.800 - Rp. 11.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 50% - 54%	Rp. 9.800 - Rp. 10.600
HARGA KARET DASAH TINGKAT PETANI K3 45% - 49% PANEN 2-3 HARI	Rp. 8.800 - Rp. 9.600
HARGA KARET DASAH TINGKAT PETANI K3 40% - 44% (BARU PANEN)	Rp. 7.800 - Rp. 8.600

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan & kumbagai Kompeten  
Inovasi, loyal, integritas & kolaborasi



## Disbun Siapkan Bibit Unggul Bermutu untuk Perkebunan Rakyat

**KUKAR** - Untuk mendukung suksesnya usaha perkebunan, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah bibit atau benih unggul.

Karenanya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur kini tengah berupaya untuk menyediakan ribuan bibit unggul untuk kebutuhan perkebunan rakyat.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ahmad Muzakkir mengungkapkan, jika benih tanaman yang palsu alias tidak unggul tentu saja bakal mengurangi pendapatan karena produksinya terbilang rendah.

Puluhan ribu bibit atau benih yang disediakan Disbun Kaltim antara lain kelapa sawit, pala, kakao, dan aren yang sangat bermutu untuk nantinya dikelola dengan baik oleh pekebun.

"Dinas Perkebunan tengah menyediakan benih unggul bermutu untuk perkebunan Rakyat. Benih terdiri dari Kelapa sawit 20.000 benih, aren

10.000 benih, pala 15.000 benih, dan kakao 5.000 benih," ucap Muzakkir, Selasa (7/11).

Dikatakan Muzakkir, pihaknya juga punya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang khusus mempersiapkan komoditas unggulan. Selain itu, kata dia, penyiapan bibit tersebut guna meningkatkan kualitas dari hasil perkebunan.

Ditambah lagi, menurut Muzakkir, bila dikelola dengan baik, hal ini mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat menekan inflasi di Benua Etam.

"Kami memiliki UPTD yang mempersiapkan bibit/ benih unggul komoditas unggulan. Tujuannya agar dapat meningkatkan produktifitas perkebunan yang berkualitas, dan juga menghasilkan PAD yang setiap tahun ditargetkan," terang Muzakkir.

"Selain itu, ini juga untuk pelestarian Keberlangsungan sumber daya genetik atau plasma nutfah tanaman perkebunan. Tentunya ini menjadi

salah satu langkah yang bisa menekan inflasi di Kaltim," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Ahmad Muzakkir telah melakukan pemantauan ke lokasi bibit, di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bersama pihaknya guna memastikan kesiapan bibit unggul tersebut.

"Ya Senin kemarin saya monitor dan cek langsung ke dua lokasi, Km 41 Batuah dan Km 38, di Loa Janan, Kukar, dalam rangka memastikan kesiapan bibit/benih, bersama staf dan kepala UPTD," ucap Muzakkir.

"Dengan upaya Dinas Perkebunan ini, kita harapkan benar-benar dapat mendorong perekonomian Kaltim. Selain itu, kita ingin menjadikan masyarakat senang dan lebih progres untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas. Dinas Perkebunan akan tetap mendorong dan membantu agar perkebunan di Kaltim bisa maju," pungkasnya. (ADV/Disbun)

Editor : Nicha Ratnasari



## Disbun Kaltim Tingkatkan Kompetensi Pengawasan

SURABAYA - Sekretaris Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Timur (Kaltim), Suroño menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah di Harris Hotel & Convention Bundaran Satelit, Jl HR Muhammad No 2A, Surabaya pada 6-7 November 2023.

Dalam kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber. Mereka adalah Inspektur wilayah II Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Ucok Abdulrauf Damenta dan Auditor Madya, Sri Utami.

Suroño mengatakan dalam kegiatan itu, para peserta dijelaskan bahwa ada tujuh problem dasar pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda). Ketujuh problem itu adalah Ketidakmandirian Pengawas atas Objek yang diawasi.

Kemudian kompetensi yang tidak

memadai untuk melakukan pengawasan, lalu Penegakan Integritas Pengawas yang masih lemah, dan konflik kepentingan dalam pengawasan.

"Selain itu, ada sistem dan governance yang masih lemah dalam pengawasan, Hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan Kebijakan, tata kelola dan kualitas program (double loop learning), dan terakhir fragmentasi lembaga pengawasan (tidak ada sinergi dan kolaborasi)," kata Suroño.

Dia juga mengatakan akibat lemahnya pengawasan keuangan dan kinerja pemerintah berimbas pada banyaknya pejabat/penyelenggara yang tersangkut kasus korupsi.

"Efek lainnya adalah kinerja pembangunan tidak berdampak dan tidak

efektifnya anggaran program dan kegiatan," ujarnya.

"Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Suroño menjelaskan, dalam kegiatan itu para peserta diminta untuk bekerja sesuai integritas sebagai abdi negara. "Kegiatan ini sangat baik untuk kembali mengingatkan kita sebagai abdi negara," tandasnya. (ADV/DisbunKaltim)

Editor : Nicha Ratnasari



## DPRD PROVINSI KALTIM



# Sekretariat DPRD Kaltim Diminta Tertib Administrasi

**SAMARINDA**- Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kalimantan Timur, Andrie Asdi, mengimbau seluruh komponen di lingkungannya untuk tertib administrasi.

Menurutnya, tertib administrasi dalam tugas kesekretariatan DPRD, termasuk keuangan maupun penatausahaan lainnya, merupakan bentuk tanggung jawab dan kesiapan menghadapi proses pemeriksaan.

Andrie menegaskan bahwa tertib administrasi menjadi penting karena dengan kelengkapan dan kerapian

dokumen tentunya akan memudahkan proses pemeriksaan.

"Nantinya ketika diaudit tidak terjadi kekeliruan yang tidak diharapkan," katanya pada awal pekan ini.

Andrie juga menyinggung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan suatu konsep yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

Prinsip tersebut yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, respon-

sivitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan keadilan, hukum dan supremasi hukum, visi strategis, pengawasan, dan konsensus.

"Konsep ini telah menjadi perhatian banyak pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan," tutupnya. **(eky/adv/dprdkaltim)**

*Pewarta : Andi Desky*

*Editor : Nicha Ratnasari*



HMS

Rapat Paripurna 40 DPRD Kaltim.

## Sah, Ranperda Inisiatif PUG Jadi Perda

**SAMARINDA** - Komisi IV DPRD Kaltim berhasil menyelesaikan pembahasan Ranperda Perubahan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan inisiatif Pemprov Kaltim. Ranperda tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan manusia di Kaltim.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Puji Setyowati dalam Rapat Paripurna Ke 40 yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Rapat juga dihadiri oleh Asisten III Setda Kaltim Reza Indra Riadi yang mewakili Pj Gubernur Kaltim.

Puji Setyowati mengatakan, Ranperda Perubahan PUG akan menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam melaksanakan strategi pembangunan pengarusutamaan gender di daerah. Ia menjelaskan, pengarusutamaan gender adalah integrasi peran gender dalam kebi-

jakan dan program pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

"Kesetaraan gender adalah di mana laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya, sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi," kata Puji Setyowati.

Ia menambahkan, dengan perubahan Perda ini, diharapkan kepentingan perempuan dan laki-laki dapat terakomodir dalam setiap tahap pembangunan, sehingga keduanya menikmati hasil pembangunan secara berimbang.

"Dengan demikian, tujuan PUG akan tercapai dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan," ujarnya.

Puji Setyowati juga mengungkapkan, Komisi IV bersama dengan Biro Hukum Setda Kaltim dan DKP3A Kaltim telah melakukan percepatan penyelesaian Ranperda tersebut.

Ia berharap, Ranperda tersebut dapat segera difasilitasi oleh Kemendagri RI, sebagaimana per-

mohonan yang telah diajukan Pimpinan Dewan kepada Gubernur Kaltim. Ia mengatakan, hal ini penting untuk segera menetapkan dan mengundang Perda tentang PUG di Kaltim.

Muhammad Samsun, sebagai pimpinan rapat, menyatakan bahwa laporan akhir hasil kerja Komisi IV telah selesai dan sesuai dengan tata tertib dewan. Ia juga menyampaikan kepada anggota dewan untuk memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan PUG tersebut.

"Ini adalah agenda kita selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, yaitu persetujuan DPRD Kaltim terhadap Ranperda inisiatif Pemprov Kaltim tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PUG Dalam Pembangunan Daerah menjadi Perda, dan pendapat akhir kepala daerah," kata Muhammad Samsun.

Dalam paripurna, forum yang menghadirkan sepakat untuk menyetujui Ranperda PAG menjadi produk hukum yang DPRD Kaltim lahirkan tahun ini. ([eky/adv/dprdkaltim](http://eky/adv/dprdkaltim))

Pewarta : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati, dan Anggota Komisi IV Fitri Maisyaroh.

## Puji Setyowati dan Fitri Maisyaroh Sampaikan Materi Kepemimpinan kepada Pelajar MTs Negeri Samarinda

SAMARINDA – Sebanyak 350 siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Samarinda bertandang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tentang Suara Demokrasi, pada Rabu (8/11/23).

Ratusan pelajar tersebut dibekali pengetahuan berkaitan tentang Motivasi Kepemimpinan dan Kiat serta Tantangan Menjadi Pemimpin. Materi secara langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh.

Siswa dan siswi MTs Negeri Samarinda mengikuti kegiatan secara terpisah, yang mana dari total keseluruhannya dibagi menjadi 2 grup dengan 2 sesi pemaparan yang dilaksanakan di Ruang Rapat sisi kiri dan sisi kanan Gedung E Lantai Dasar Kantor DPRD Kaltim.

“Saya pikir ini adalah langkah strategis yang dilakukan oleh MTs Negeri Samarinda dalam rangka memper-

siapkan Sumber Daya Manusia yang sehat, pintar, cerdas dan juga unggul, mempunyai daya saing dan yang paling penting mereka mempunyai karakter yang baik,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati saat ditemui usai menyampaikan paparan materinya.

Apresiasi itu diberikannya mengingat kunjungan MTs Negeri Samarinda ke DPRD Kaltim ini menurutnya ialah bagian daripada proses pembelajaran putra putri peserta didik, dalam menumbuhkan karakter kepemimpinan di P5.

“Harapan kita kurang lebih 26 tahun lagi mereka yang merupakan generasi Z berumur 13 atau 14 tahun ini adalah calon-calon pemimpin kedepan. Sejak dini sudah dipersiapkan tidak hanya secara ilmu pengetahuan. Tetapi juga bagaimana kepekaan sosial di dalam menghadapi perubahan-perubahan di era digitalisasi dan juga bagaimana menumbuhkan karakter bagi anak-anak didik,” pungkasnya.

Selaras dengan itu, Kepala MTs Negeri Samarinda Misbakhur Suru-

ri membenarkan bahwa kegiatan tersebut ialah salah satu rangkaian dari pembelajaran yaitu kegiatan P5 yang mana dilaksanakan dengan tujuan agar pelajar dapat mendapatkan pembelajaran secara langsung di luar lingkungan sekolahnya.

“Sehingga anak diajak untuk real belajar, turun mengalami atau bahkan melakukan pengalaman-pengalaman hidup. Tujuannya ketika nanti siswa terjun ke masyarakat, mereka sudah pernah punya pengalaman di dalam melaksanakan kehidupan atau bahkan pernah mempelajari tentang penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan kita,” ungkap Misbakhur Sururi menambahkan.

Setelah itu kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kaltim untuk MTs Negeri Samarinda dan dari MTs Negeri Samarinda untuk DPRD Kaltim. (adv/dprdkaltim)

Pewartu : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.

## Aset Pemprov Kaltim Belum Terkelola dengan Baik

**SAMARINDA** - Aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih banyak yang belum terkelola dengan baik. Seperti Hotel Atlet Sempaja yang dibangun pada tahun 2008 sebagai sarana penunjang PON XVII di Kalimantan Timur.

Hal demikian menjadi sorotan Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Hotel Atlet yang berlokasi di Komplek Stadion Sempaja yang kini berganti nama menjadi Gelora Kadrie Oening tersebut, saat ini dibiarkan tak difungsikan. Padahal, menurutnya hotel tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah.

"Seyogyanya itu tidak berpikir hanya cuma untuk atlet fasilitas atlet, Pemprov harus pikirkan bahwa pasca ini mau seperti apa.

Jadi ketika ada momentum event-event nasional terkhususnya di Kalimantan Timur itu bisa digunakan,"

terangnya kepada media ini, Rabu (8/11/2023).

Sapto menilai bahwa bangunan tersebut sejak awal ditujukan sebagai hotel. Bila kembali dimanfaatkan sebagai hotel kondisinya sudah tidak layak. Dan bila diperuntukan atau dialihfungsikan untuk hal lain maka perombakan harus dilakukan. "Ini yang menjadi kendala, bahwa ketika kita bicara memanfaatkan itu sudah tidak layak.

Kalau mau dibuat hotel selain peruntukan awalnya, harus merombak mau ndak mau suka ndak suka," ucapnya. Pemerintah provinsi berencana untuk memanfaatkan kembali hotel ini sebagai gedung perpustakaan atau tempat usaha kuliner dan UMKM.

Beberapa pihak swasta juga tertarik untuk mengelola hotel ini, seperti Bakrie Group yang menawarkan Rp 38 miliar untuk mengambil alih hotel

ini pada tahun 2013. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan pasti tentang nasib hotel ini.

"Nah itu beberapa kali itu ditawarkan oleh pihak ketiga tapi tidak pernah clear juga. Ya enggak pernah tuntas," bebarnya.

Ia berharap, pemerintah bisa lebih bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola aset-aset milik daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah.

"Kita harus bersama-sama mengawal aset-aset kita. Jangan sampai kita rugi dan menderita karena kelalaian pemerintah. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara," pungkasnya. **(eky/Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



HUMAS

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi "Menuju UMKM Kompetitif" di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Selasa (7/11/2023).

## UMKM Kompetitif, Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Kecamatan Balikpapan Selatan

BALIKPAPAN-Kecamatan Balikpapan Selatan menggelar sosialisasi dan edukasi "Menuju UMKM Kompetitif" di Aula Kecamatan, Selasa lalu (7/11/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud yang membuka kegiatan ini mengatakan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian masyarakat. Ia mengapresiasi upaya Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mengembangkan potensi UMKM di daerahnya.

"Tanpa dukungan UMKM akan sulit berkembang. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah mengadakan kegiatan ini. Saya harap ini bisa menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lain di Kaltim," ujar Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.

Hamas juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyediakan berbagai program yang pro terhadap UMKM. Namun, ia mengakui bahwa sosialisasi program-program tersebut masih kurang maksimal.

"Ada banyak program yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), perizinan online, pendampingan, dan pelatihan. Saya berharap pelaku UMKM bisa lebih aktif mencari informasi dan mengikuti program-program tersebut. Ini akan sangat membantu mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka," tutur Hamas.

Politikus Golkar ini juga menekankan bahwa UMKM telah membuktikan ketangguhannya di tengah pandemi Covid-19. Banyak usaha besar yang terpaksa tutup, tetapi UMKM masih bisa bertahan dan bahkan berkembang.

"UMKM adalah penopang perekonomian masyarakat. Di saat pandemi, UMKM mampu beradaptasi dan berinovasi. Ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk menjadi usaha yang kompetitif. Saya berharap generasi muda juga tertarik untuk terjun ke dunia UMKM," imbuh Hamas.

Sementara itu, Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim mengatakan bahwa UMKM merupakan solusi dalam menciptakan kemandirian perekonomian berbasis kerakyatan. Ia menilai bahwa UMKM sangat dibutuhkan di wilayahnya yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah.

"Kecamatan Balikpapan Selatan ini terdaftar ada 700 ribu lebih jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah seiring menjadi daerah yang bertangga dengan IKN. Ini membuat persaingan usaha semakin ketat. Karena itu, kami mengadakan kegiatan ini untuk memberikan bekal informasi yang diperlukan bagi pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif," jelas Hakim.

Hakim juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kaltim yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada UMKM di Kecamatan Balikpapan Selatan. Ia berharap dukungan tersebut tidak hanya untuk UMKM saja, tetapi juga untuk sektor-sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur.

"Kami mengapresiasi dukungan pak Ketua DPRD yang telah banyak membantu kami melalui bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah kota Balikpapan. Kami berharap kerjasama ini terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Balikpapan Selatan khususnya dan Kaltim pada umumnya," pungkas Hakim. ([adv/dprdkaltim](#))

Pewartu : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



## Akademisi Hukum Unmul dan ALHI Silaturahmi dengan DPRD Kaltim

**SAMARINDA** - Sejumlah akademi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) dan Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI) melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa malam lalu (7/11/2023).

Kunjungan ini diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu yang mewakili pimpinan DPRD Kaltim di Ruang VIP Gedung D, Lantai 6 DPRD Kaltim. Ia yang didampingi Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, mengungkapkan rasa senang dan terima kasih atas kedatangan para akademisi hukum tersebut.

"Kami senang dan berterima kasih atas kunjungan bapak dan ibu di kantor kami. Ini merupakan kesempatan untuk bersilaturahmi, berdiskusi, dan bertukar pikiran antara DPRD Kaltim dan para pakar atau akademisi hu-

kum dari FH Unmul dan ALHI," kata Demmu.

Polisiti PAN ini, juga mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim selalu berusaha menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur, baik negeri maupun swasta. Ia menilai bahwa peran dan kontribusi pemikiran akademisi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya dari aspek hukum.

"Setiap lini pemerintahan dan kebijakan pembangunan tidak bisa lepas dari aspek hukum. Termasuk kami sebagai anggota DPRD yang memiliki tugas dan fungsi legislatif. Kami terbuka menerima saran, masukan, bahkan kritik membangun dari para akademisi hukum untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kami sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Legislator Dapil Kukar ini, juga men-

yampaikan apresiasi atas rencana pelaksanaan seminar internasional dan rapat kerja nasional ALHI yang akan diselenggarakan di FH Unmul. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan maksimal, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas fakultas hukum di Kalimantan Timur, Indonesia, dan masyarakat luas.

Acara silaturahmi ini ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kaltim kepada akademisi FH Unmul dan ALHI. Cinderamata tersebut diserahkan oleh Demmu kepada Dekan FH Unmul Mahendra Putra Kurnia, dan oleh Jahidin kepada Ketua ALHI Juajir Sumardi. (Eky/Adv/dprdkaltim)

Pewartu : Andi Desky  
Editor : Nicha Ratnasari



Satuan Pamong Praja yang berstatus honorer, diminta DPRD Kaltim diangkat menjadi P3K.

## DPRD Kaltim Dorong Pemprov Angkat Honorer Satpol PP Jadi P3K

**BALIKPAPAN** - Ketua DPRD Kaltim, Hassanudin Mas'ud, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menyelesaikan nasib tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Politisi Golkar ini mengatakan, pihaknya sudah mendapat surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait hal ini. "Kita minta eksekutif untuk segera menjawab, supaya status teman-teman Satpol PP yang sesuai UU bahwa

Satpol adalah PNS itu kita bisa masukan," ujarnya akhir pekan lalu.

Pria yang kerap disapa Hamas ini, menyatakan perubahan status honorer Satpol PP menjadi P3K memang terkendala oleh aturan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Aturan itu adalah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus tenaga honorer.

Namun, ia meyakini bahwa Pemprov Kaltim memiliki anggaran yang cukup untuk menjamin keberadaan honorer Satpol PP. Ia bahkan mengklaim bahwa APBD Daerah

bisa menampung sekitar 3 ribu ASN seluruh Kaltim.

Oleh karena itu, ia mendorong Penjabat Gubernur Kaltim untuk membuat surat ke menteri terkait agar semua Satpol PP bisa diangkat menjadi P3K. Ia berharap hal ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemprov.

"Aturan yang membenturkan. Ini untuk seluruh kabupaten/kota, kemungkinan bisa seluruh Indonesia. Tapi kita tetap minta Kaltim dan seluruh kabupaten/kota semua jadi bagian P3K," tutup Ketua DPRD Kaltim tersebut. **(eky/adv/dprdkaltim)**





SAMARINDA

# GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

**Berlaku hingga 30 Desember 2023**

SCAN BARCODE  
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

[all.accor.com](https://all.accor.com)



Sri Kumalasari saat menyerahkan notulen R-APBD Fraksi Golkar DPRD Berau.

## Fraksi Golkar Harap Peningkatan APBD Berau Dirasakan Langsung oleh Masyarakat

**TANJUNG REDEB** - Fraksi Golkar menyetujui Raperda APBD Berau 2024 dijadikan Perda. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Juru Bicara Golkar, Sri Kumalasari dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi mengungkapkan, Aparatur Sipil Negera (ASN) harus lebih semangat dalam melayani masyarakat.

Selain itu, penyertaan modal kepada perusahaan daerah diharapkan berkinerja dengan baik dan profesional sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dengan pendapatan yang cukup signifikan semoga peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kita semakin baik demi kesejahteraan," ungkapnya.

Daerah Kabupaten Berau dengan porsi total pendapatan Rp 4,271 Triliun lebih," tuturnya dalam rapat paripurna.

"Yang Terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 254 Miliar lebih, dana pendapatan transfer Rp 4,10 Miliar lebih. Total belanja Rp 719 miliar," sambungnya.

Sri Kumalasari berharap, besarnya APBD Berau Tahun 2024 mendatang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Berau. "Tentunya kita menginginkan peningkatan pembangunan merata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita juga berdampak baik," tandasnya. (adv/dez)

Ditegaskannya, dengan meningkatnya anggaran, pasti semakin banyak pula belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, jaringan komunikasi dan lain-lain.

"Seluruh OPD dalam pelaksanaan APBD 2024 harus optimal dalam penyerapan anggaran," katanya. Ia menilai, pengawasan juga harus dilakukan, sehingga pelaksanaan APBD tahun 2024 sesuai dengan rencana dan arahan kebijakan pembangunan daerah.

"Berdasarkan masukan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Golkar Berau menyetujui R-APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan peraturan

## Ajakan Berau Gabung ke Kaltara, Harus Ada Kajian Dulu



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

**TANJUNG REDEB** - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong pada Senin (6/11/2023) lalu menghadiri diskusi laporan akhir rencana penggabungan Berau dengan Kaltara di Tanjung Selor.

Dirinya menilai, wacana itu cukup menarik untuk didiskusikan ke depan. "Kami apresiasi inisiasi dari Kaltara. Dalam hal wacana penggabungan Kabupaten Berau masuk Kaltara," ucapnya.

Dia juga menegaskan, bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut hanya melihat dan mendengarkan wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Kaltara sesuai kajian akademis Pemprov Kaltara. "Kami hanya anggota DPRD, representatif ada di tangan masyarakat," sebutnya.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil diskusi tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat di Berau. Setelah itu melihat respon mereka. Kabupaten Berau pun bakal

menyusun kajian akademis terkait visi misi kepentingan Bumi Batiwakal tersebut di Kaltara.

"Kemudian dari sisi kepentingan Kabupaten Berau sendiri. Itu kita juga akan melakukan kajian akademis pula itu yang akan kita diskusikan di tingkat Kabupaten Berau bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemkab Berau," bebernya.

Dia menilai hal itu bakal butuh proses waktu yang cukup lama. Pasalnya keputusan tersebut juga bersifat sakral. Apalagi ajakan bergabung ke Kaltara itu sudah wacana sejak lama. Pasti ada pandangan positif dan negatifnya. Pun keuntungan yang bisa didapatkan kedua daerah.

Sebab selama ini Kabupaten Berau yang masih menjadi bagian Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa faktor unggulan harus diperjuangkan. "Seperti kita ini menjadi salah satu penyangga IKN yaitu pada sektor pariwisata," pungkasnya. (adv/dez)

## Pemerintah Harus Tegas Terhadap Lahan yang Tak Kantongi Amdal



Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman

**TANJUNG REDEB** - Masih banyaknya lahan yang tidak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman. Dia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memberi peringatan tegas melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Seharusnya pengelolaan lahan tanpa izin Amdal segera ditangani. Jangan dibiarkan begitu saja, karena menjadi dampak negatif bagi masyarakat," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, OPD terkait harus dapat memastikan lahan yang dikelola setiap perusahaan sesuai dengan peraturan dan komitmen untuk lingkungan masyarakat.

"Jangan hanya mau mengambil sumber daya alam saja, tapi tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, termasuk bagaimana komitmen perusahaan dalam mengelola lahan pasca dilakukan pertambangan," ucapnya.

Dikatakan Rahman, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan lahan namun tidak mengutamakan Amdal dalam pelaksanaannya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dirinya menyebut, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan bersama pihak DLHK dan terkait lainnya untuk membahas hal tersebut lebih lanjut.

"Kami berharap DLHK lebih serius terhadap persoalan ini dan kami juga akan melakukan pembahasan hal ini lebih lanjut jika nanti sudah ada waktunya," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Fraksi PPP DPRD Berau, Suharno dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi.

## Singgung Janji Kampanye, Tentang Membangun dari Pinggiran

TANJUNG REDEB - Dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi pada Selasa (7/11/2023) lalu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau, Suharno menyatakan pihaknya setuju dengan R-APBD tahun 2024.

Menurutnya, hal yang penting dalam rangka penyelarasan anggaran harus sepadan dengan kondisi keuangan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan semangat dalam mengangkat konsep mendorong ke arah pencapaian visi Kabupaten Berau suatu langkah tepat dalam pelaksanaan misi berbasis kinerja dan berkarakter.

"Dengan APBD sebesar Rp 4 Triliun lebih, maka kami dari fraksi PPP mengimbuai seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan kinerjanya supaya dengan waktu yang ada serapan anggaran yang diusulkan dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ungkap Suharno.

Selain itu, pihaknya juga mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal. Dengan catatan, tetap memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara sinergi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi terutama pada Dinas PUPR Berau dan OPD yang lainnya dalam serapan belum maksimal.

Menurutnya, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

"Harapan kami setelah ditetapkannya rancangan APBD tahun anggaran 2024 ini agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Berau," tuturnya.

"Kami dari fraksi PPP, mengingatkan kepada Pemkab Berau sesuai dengan janji pada waktu kampanye yaitu pembangunan dimulai dari pinggiran, di kota hanya pembenahan. Dengan segala kritik dan saran di atas semoga Pemkab Berau dapat lebih berbenah dalam melaksanakan programnya ke depan," pungkasnya. (adv/dez)

## Kembali Suarakan Jeritan Petani di Perbatasan Berau-Kutim



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena

**TANJUNG REDEB** - Jeritan para petani yang tinggal di perbatasan antara Berau dan Kutai Timur (Kutim) kembali disuarakan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

Ia membeberkan, persoalan tapal batas di wilayah tersebut hingga saat ini belum juga selesai. Karena hal itu, para petani tidak menikmati hasil kebun milik sendiri.

"Karena lahannya dirampas oleh Kutim dengan cara paksa. Dan itu telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini," ungkapnya.

Selain itu, ia juga kerap menerima keluhan dari para petani karena mereka sering diintimidasi. Dimana mayoritas mereka merupakan petani sawit. Jika persoalan tapal batas ini tak kunjung ada kejelasan mereka yang dirugikan.

"Pihak Kutim mengatakan itu lahan mereka. Sedangkan, berdasarkan aturan yang berlaku, lahan itu milik Berau," tuturnya.

Darlena meminta Pemkab Berau bisa tegas untuk menuntaskan permasalahan tapal batas ini. Sebab, lahan di sana sudah diakui oleh Kutim dengan cara memasang tapal batas. "Kami hanya memfasilitasi sebagai wakil rakyat, karena penentu kebijakan tetap kepala daerah," tandasnya. (adv/dez)





**SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN**  
 \* TOYOTA MOTOR OIL

**Khusus Taxi Online & Travel**

**GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE**

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**





**AUTO 2000**  
 member of ASTRA

Bontang



Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono.

## Budiono Sebut Inisiatif Penyerahan Fasum Masih Rendah

**BALIKPAPAN** - DPRD Kota Balikpapan mengeluhkan masih rendahnya inisiatif pengembang yang menyerahkan fasilitas umumnya kepada pemerintah. Hal itu pun berdampak pada kesulitan pemerintah melakukan perbaikan. Sementara cukup banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan dan permintaan perbaikan atas fasilitas umum.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, laporan yang ada sudah menunjukkan hal tersebut. Tercatat baru sekitar 50 pengembang yang menyerahkan aset fasilitas umum ke pemerintah setempat. Padahal jumlah pengembang yang tercatat beroperasi di Balikpapan mencapai 230-an.

“Pengembang itu ada sekitar 230 lebih itu mungkin nggak sampai 50 yang baru menyerahkan. Mungkin ya, bahkan kurang dari 50 pengembang,” ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut Budiono menjelaskan, kendala yang dihadapi terkait banyaknya pengembang yang belum memenuhi aturan pembangunan perumahan. Seperti, pengaturan persentase kawasan di setiap daerah pemukiman.

Peraturan daerah setempat mewajibkan pengembang memiliki fasilitas pemakaman, jalan umum drainase hingga ruang terbuka hijau. Persentasenya mencapai sekitar 40 persen dari total lahan milik pengembang.

“Dari informasi OPD yang menanganikan, masih banyak syarat-syarat

yang belum terpenuhi. Karena di Perda kita itu ada 40 persen yang masuk dalam sarana prasarana umum. Mulai dari jalan, drainase, RTH hingga pemakaman,” jelasnya.

Untuk itu Budiono terus meminta kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk bersikap tegas kepada para pengembang, agar mau sesegera mungkin menyerahkan fasilitas umumnya. “Ini kan juga untuk mempermudah pemkot melakukan perbaikan atau normalisasi fasum-fasum yang ada, yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat,” tutupnya. **(ADV/DPRD Balikpapan/Bom)**

Pewartu : Aprianto  
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Japar Sidik.

## Tidak Ada Titik Terang Soal Banjir di GPA, DPRD Sarankan Pemkot Pakai Jalur Hukum

**BALIKPAPAN** - DPRD Kota Balikpapan turut dibuat geram, lantaran kedua pengembang perumahan yakni Griya Permata Asri (GPA) dan Daun Village belum juga menuntaskan persoalan permasalahan banjir di Perumahan GPA.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Japar Sidik mengatakan, permasalahan banjir di Perumahan GPA ini demi kepentingan masyarakat setempat, dan ini merupakan tanggungjawab pemerintah maupun DPRD sebagai lembaga pengawas di pemerintahan.

Japar Sidik juga tegaskan, bahwa permasalahan banjir di GPA ini muaranya ada di dua pengembang yang masing-masing mempertahankan argumentasinya dan merasa

benar masing-masing.

"Akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat. Karena penyebab banjir air tak bisa dibuang," ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Menurut Japar, antara pengembang Griya Permata Asri (GPA) dan Daun Village harusnya memikirkan bersama-sama bagaimana mencari solusi terkait hal tersebut.

"Jika sama-sama memikirkan, artinya biaya ditimbulkan sama-sama ditanggung. Semestinya kan sederhananya begitu. Sehingga masyarakat tidak dikorbankan," jelasnya.

Dia juga menegaskan bakal terus mengawal persoalan banjir di GPA ini sepanjang pihaknya mengikuti pertemuan untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

Di samping itu dirinya juga mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jika memang tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka jalur hukum harus ditempuh.

"Hukum aja yang bermain. Masa masyarakat digantung seperti ini dibiarkan terdampak banjir, itu nggak boleh. Itu tanggungjawabnya pemerintah dan harus ada solusinya. Pemerintah harus tegas, masa kalah sama pengembang, kan kasian masyarakat yang dikorbankan," tutupnya. **(ADV/DPRDBalikpapan/Bom)**

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib.

## Najib Soroti Regulasi Baru Izin Penggunaan Sumur Air Tanah

**BALIKPAPAN** - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan penggunaan air tanah harus memiliki izin dari kementerian terkait.

Aturan soal izin ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G tahun 2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang dikeluarkan pada 14 September 2023 lalu.

Hal ini mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib terkait regulasi baru terkait penggunaan sumur dalam air tanah.

Najib menyebut, selama ini izin membuat sumur dalam tanah dike-

lola oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Namun jika kewenangan diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, maka masyarakat tidak bisa seenaknya mengambil dan memanfaatkan air tanah dan sungai lagi.

"Sudah barang tentu, pemerintah Provinsi Kaltim tidak mempunyai kekuatan lagi untuk memberikan izin penggunaan air tanah," ujarnya, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut Najib menjelaskan, dampak lain yang akan ditimbulkan bagi Kota Balikpapan tidak ada lagi bantuan keuangan (Bankue) Provinsi yang diambil dari pajak air sumur dalam tanah.

"Yang jadi masalah, bagaimana menggunakan sumur tanah dalam yang digunakan keperluan fa-

sum-fasos. Termasuk masyarakat yang pakai air tanah wajib izin. Bagaimana dengan sumur yang sudah lama ada kan," jelasnya.

Untuk itu, Komisi I akan melakukan pemanggilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

"Kita coba akan lakukan diskusi dengan DPMPPT dulu, seperti apa sih regulasinya ini dilapangan nantinya," tutup Najib. (ADV/DPRD-Balikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Raker Komisi III DPRD Balikpapan bersama mitra kerjanya di ruang Meranti Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (8/11).

## Komisi III Bersama Mitra Kerja Gelar Raker Inventaris Kajian dan Naskah Akademik

**BALIKPAPAN**-Dalam rangka inventarisasi kebutuhan kajian akademik dan naskah akademik, serta persiapan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-perda) Tahun 2024, Komisi III DPRD Balikpapan menggelar rapat kerja (Raker) bersama mitra kerjanya pada Rabu (8/11/2023).

Mitra kerja tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang (DPPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Kordinator Komisi III DPRD Kota

Balikpapan, Sabaruddin Panrecale mengatakan, rapat kerja ini untuk mendiskusikan kajian akademik dan naskah akademik.

Dalam kesempatan tersebut komisi III DPRD Kota Balikpapan mengundang OPD mitra untuk mendiskusikan berkaitan dengan kajian dan naskah akademik yang dianggap urgensi tentang pembangunan.

"Itulah yang akan kita minta kajiannya, karena kajian ini ada dari inisiatif DPRD dan Pemkot Balikpapan untuk mensinkronisasikan hal-hal yang dianggap urgensi," ujarnya.

Lebih lanjut Sabaruddin menjelaskan, untuk naskah akademik jika memang itu sudah dianggap final, maka akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda) karena telah menggunakan anggaran pemerintah Kota Balikpapan dan sudah dilaksanakan

bersama.

"Inilah substansi rapat kerja dalam pertemuan antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan," jelasnya.

Tiga naskah akademik tersebut berasal dari DLH, Disperkim dan Dishub. Diakuinya, ketiga itu sangat urgensi, apalagi terkait penanganan sampah pesisir dan limbah beracun.

"Penanganan sampah dianggap tantangan Balikpapan karena bersamaan dengan kota nyaman dihuni sekitar kota yang bersih, indah, aman dan nyaman. Kemudian, limbah itu juga banyak kita menyaksikan yang tidak termonitor dengan baik sehingga jadi momok buat kita semuanya," tutupnya. **(ADV/DPRD Balikpapan/Bom)**

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



## Warga Perumahan Griya Bontang Kuala Keluhkan Fasum, Abdul Malik Harapkan Raperda Sarpras Jadi Solusi

**BONTANG**- Para warga perumahan Griya Wisata Bontang Kuala mengeluh lantaran terkait fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di area Perumahan Griya yang dianggap sangat kurang memadai.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik mengatakan telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman yang merupakan inisiatif DPRD Bontang.

"Raperda ini sudah masuk tahap harmonisasi di Biro Hukum Provinsi Kaltim dan selanjutnya akan dipaparkan untuk disahkan jadi Perda (Peraturan Daerah)," ujarnya pada Selasa (7/11/2023).

Selain itu, tidak diserahkannya aset fasum dan fasos oleh pihak developer kepada Pemerintah Kota Bontang sehingga bantuan dari pemerintah hingga pokok pikiran Anggota DPRD Bontang tidak bisa menyentuh fasum dan fasos di sana. Dengan adanya Perda ini, diharapkan bisa menjadi landasan payung hukum.

"Ada yang didasari peraturan pemerintah tujuannya agar penerima jasa fasilitas umum bisa ada kejelasan dan segala jenis fasilitas umum di dalamnya harus mendapat perhatian para pengembang," ungkapnya.

Dia juga berharap dengan adanya perda ini nantinya dapat menjadi solusi permasalahan fasum dan fasos di Kota Bontang yang tak kunjung tuntas. Pengembang di Bontang kurang lebih ada 21, sementara yang terdata aktif ada 15. Lainnya meninggalkan catatan tertentu.

Terkait dengan perselisihan an-



**Abdul Malik, Anggota Komisi III DPRD Bontang**

tara warga dan developer perumahan Griya Wisata Bontang Kuala. Komisi III DPRD Bontang tidak bisa memberikan keputusan hukum yang mengikat. Sebab tugas kami hanya memediasi atau menjadi penengah atas perselisihan yang terjadi. Harapan besar permasalahan ini bisa segera selesai.

"Untuk menengahi permasalahan yang ada, kami telah melakukan sidang keperumahan Griya dan menghadirkan developer untuk mendengar semua penjelasan semua pihak," paparnya.

Untuk permasalahan fasum dan fasos bukan kali pertama yang dialami Perum Griya Wisata. Sebab,

pihaknya juga beberapa kali ingin membantu perbaikan rumah ibadah di salah satu perumahan di Bontang Barat tidak bisa karena proses wakaf yang belum rampung.

"Legal standing dari wakaf rumah ibadah itu harus jelas, karena ketika ingin mendapatkan bantuan dari APBD ataupun Pokok Pikiran anggota DPRD harus jelas Surat Wakaf, Akta Wakaf dan Sertifikat Wakafnya yang dikeluarkan Kementerian Agama Kota Bontang bersama pertanahan," tutupnya. (dwi/adv).

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



# COOL NOVEMBER

Deluxe Room Only

# Rp 488rb

nett/night

**GRATIS WELCOME VOUCHER**

**Breakfast**

2 pax



**FREE**

**Laundry**

Up To 2 pcs



**FREE**

**Kopi Inspirasi**

Buy 3, Pay 2



**FREE**

**Afternoon  
Tea**



**FREE**

**Ice Cream**



**→ BOOK NOW**

**0811 581 3669**

[www.hotelgrandkartika.com](http://www.hotelgrandkartika.com)



TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

**LET'S TEST DRIVE!**

**EZ Deal**  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

**AUTO2000 BONTANG**  
Jl. Bigun Karama No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

**BOOKING THS SAJA**

**BTS**  
*di Digiroom*

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA\*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

**Kode Promo**  
**BTSOLI**

\*Syarat dan ketentuan berlaku

**Informasi - Call/WA :**  
**Adi S : 0822-5435-0088**

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang



## Konsisten Realisasikan Prinsip SDGs, Badak LNG Raih Penghargaan Asia Sustainability Report Rating 2023

**BONTANG** – National Center for Corporate Reporting (NCCR) kembali menyelenggarakan ajang Asia Sustainability Report Rating (ASSRAT) pada Senin (6/11) di Jakarta. Acara penghargaan ASSRAT yang diikuti 68 perusahaan dan organisasi ini berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta dan mengusung tema Navigating the Path to Net Zero: Accelerating Climate Action In Asia.

Sebagai salah satu Perusahaan yang berkomitmen pada sektor energi bersih, Badak LNG dianugerahi penghargaan kategori Gold dalam ajang ini. Penghargaan diserahkan oleh ketua NCCR, Ali Darwin dan

diterima oleh Manager CSR & Relations Badak LNG, Putra Peni Luhur Wibowo. Pada kesempatan tersebut Luhur mengungkapkan merasa bangga dan bersyukur atas yang didapatkan.

“Kami merasa sangat terhormat dan bersyukur untuk menerima penghargaan ini, dan kami akan terus bekerja keras serta senantiasa memberikan kontribusi terbaik terhadap masyarakat dan lingkungan,” tuturnya.

Badak LNG dalam kegiatan operasionalnya selalu menerapkan prinsip-prinsip sustainable development goals atau SDGs. Hal ini

tercermin dengan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik, selalu berinovasi dalam upaya penghematan energi, hingga menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

Badak LNG telah berhasil memperkuat komunikasi kinerja keberlanjutan kepada para stakeholders melalui laporan keberlanjutan atau sustainability report yang komprehensif. Tidak hanya mencerminkan pencapaian Perusahaan, tetapi sustainability report ini juga selaras dengan standar pelaporan global seperti Global Reporting Initiative (GRI).



Di era yang menuntut Perusahaan untuk bergerak aktif menghadapi isu-isu yang berkelanjutan, Badak LNG terus berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik dalam dunia industri, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, serta melakukan improvisasi dalam

lini-bisnisnya.

Penghargaan ini juga tidak hanya menjadi prestasi semata, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Badak LNG bersungguh-sungguh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Badak LNG secara konsisten terus mengimple-

mentasikan hal tersebut dengan terciptanya program-program serta inovasi yang didasarkan pada prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) guna mencapai visi yang lebih baik dan berkelanjutan. (adv)

**radar.**  
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP



INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0853 4894 3982

[www.radaribukota.com](http://www.radaribukota.com) | [www.radarkutim.com](http://www.radarkutim.com)  
[www.radarkukar.com](http://www.radarkukar.com) | [www.samarinda.com](http://www.samarinda.com)  
[www.radarberau.com](http://www.radarberau.com) | [www.radar.paser.com](http://www.radar.paser.com) | [www.radarbaikpapan.com](http://www.radarbaikpapan.com)

# Upaya Tawarkan Investasi, DPMPTSP Rutin Ikuti Expo

**BONTANG** - Sesuai dengan arahan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk kemajuan pembangunan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) rutin menawarkan investasi dengan ikut hadir dalam pameran-pameran yang ada di Kota Bontang.

Terdapat 17 peluang investasi yang ada di Kota Bontang. Di antaranya adalah pergudangan, pelabuhan, pabrik pengolahan limbah, pabrik pengolahan garam, pabrik penyulin-

gan air laut, pabrik pengalengan ikan, pengolahan rumput laut, pabrik Iso-tank, pabrik pemrosesan biodiesel.

Kemudian gliserin, sabun dan detergen, pabrik pembuatan kaca, baking soda, jeruk, pabrik pengolahan karet, pasar dan terakhir terminal.

"Ini jenis investasi tahun 2022, tahun ini mungkin ada update penambahan," jelas Analis kebijakan ahli muda, Lamri.

Ia menjelaskan bahwa dalam expo tentunya mereka menjelaskan kepa-

da para investor terkait lahan yang tersedia serta potensi-potensi yang bisa dilakukan. Hal ini dilakukan agar Bontang dapat berkembang pasca Migas.

"Seperti yang kita ketahui bahwa kita nggak bisa terus berharap sama perusahaan, jadi kita harus menarik investor dengan cara apapun," harapnya. **(Sya/adv)**

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari



SYAKURAH/RADARBONTANG

Asdar Ibrahim, Kepala Dinas DPMPTSP

## DPMPTSP Harap Pengolahan Limbah B3 Dapat Masuk Ke Bontang

**BONTANG** - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama dengan calon investor PT. Sinergi Jelma Anugerah membawahi unit perusahaan Koperasi Serba Usaha Setia Mahardika (SMAR's) melakukan kunjungan lapangan terkait investasi limbah Bahan Besar Beracun (B3).

Adapun alasan mereka tertarik di sektor tersebut karena di wilayah Kalimantan Timur sendiri belum memiliki pengolahan limbah B3 seperti oli bekas, aki, dan lain-lain. Kemudian, dari 18 item investasi yang ditawar-

kan terdapat pengolahan limbah B3.

"Perusahaan tersebut sebelumnya memiliki pengolahan limbah B3 di wilayah Jombang," jelas Kepala Dinas DPMPTSP, Asdar Ibrahim.

Mereka berkunjung pada hari Senin (6/11/23) kemarin dan langsung melihat lokasi lahan industri yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari.

"Kami belum tahu pasti, rencana mereka akan membangun Koperasi saja atau PT juga," katanya.

Asdar menjelaskan bahwa peluang tersebut hasir karena Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota Negara

(IKN) sehingga penanganan limbah B3 perlu hadir dan Kota Bontang menjadi target lokasi tersebut.

Untuk luas wilayah yang mereka minta untuk pembangunan gudang hingga produksi kemungkinan akan membutuhkan sekitar 100 hektar tanah.

"Mereka sempat bilang harga tanahnya agak mahal, tapi nanti akan ada negosiasi pasti. Semoga mereka berminat," tutupnya. **(Sya/adv)**

Pewarta : Syakurah

Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Pelaksanaan Solution Week dan Refresh Training bagi tenaga kesehatan RSUD Bontang.

## RSUD Bontang Gelar Solution Week dan Refresh Training, 'Update' Keilmuan Tentang Alat Kesehatan

**BONTANG** - RSUD Taman Husada Kota Bontang melaksanakan Solution Week dan Refresh Training Mindray bagi perawat, bidan maupun dokter yang menggunakan alat kesehatan produksi dari PT Mindray Medical Indonesia yang dilaksanakan pada 8-9 November 2023 bertempat di ruang Nusa Indah, lantai 5 RSUD Bontang.

Acara ini digelar dalam rangka meningkatkan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan pasien untuk penggunaan alat-alat kesehatan.

Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan RSUD Taman Husada Bontang, dr Niken Titisurianggi, M.Kes mengatakan dilaksanakan Solution Week dan Refresh Training Mindray untuk memberikan penyegaran pengetahuan mengenai alat-alat kesehatan yang digunakan di RSUD Taman Husada Bontang yang diproduksi atau disuplai oleh Mindray.

Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan visi rumah sakit menjadi rumah

sakit terbaik di Kaltim berstandar internasional.

"Orientasi pada keselamatan pasien. Salah satu caranya harus merefresh SDM bagaimana keilmuan mengenai penggunaan alat-alat kesehatan. Ini juga merupakan komitmen mitra-mitra kami dibidang penyedia alat kesehatan sehingga mendukung kami," jelasnya kepada Mediakaltim.com, Rabu (8/11/2023).

Ia mengatakan, SDM RSUD Bontang harus mengetahui penggunaan alat-alat kesehatan terbaru. Sehingga ketika ada permasalahan dapat segera ditangani.

"Bagaimana ketika ada trouble-trouble bisa langsung diatasi. Paham optimalnya, bagi tenaga kesehatan. Tujuannya pasien safety," katanya.

dr. Niken menambahkan modal utama selain skill bagi SDM yakni alat-alat kesehatan yang baik yang digunakan bagi masyarakat atau pasien. Dengan penggunaan alat kesehatan yang benar, akan dapat

membantu masyarakat dan lebih efisien bagi penggunaan anggaran.

"Harapannya teman-teman dapat aware lagi. Ini menjadi modal bagi SDM membantu masyarakat yang dapat digunakan dengan baik," ungkapnya.

Sementara, perwakilan PT Mindray Medical Indonesia, Dwi Restyantoro mengatakan pihaknya memberikan Solution Week dan Refresh Training Mindray untuk komitmen berkontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

"Ini merupakan komitmen kami sesuai dengan kapasitas kami. Jadi kami memberikan produk-produk terbaru dan bagi pengguna-pengguna untuk memberikan update ilmu mengenai alat-alat kesehatan kepada dokter dan perawat," tandasnya. **(adv/yah)**

Penulis: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Kabid Pelayanan medik dan pengendalian mutu RSUD Bontang, dr Tri Ratna Paramita.

## Beberapa Klinik RSUD Bontang Terapkan Klaster Pasien Guna Mengurangi Antrean

**BONTANG** – Layanan beberapa klinik di RSUD Taman Husada Kota Bontang menggunakan sistem klaster dalam pelayanan ke klinik-klinik. Hal ini untuk memudahkan masyarakat agar tidak mengalami antrean cukup lama pada saat telah mendaftar secara online.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Tamam Husada Bontang, dr Tri Ratna Paramita mengatakan pelayanan beberapa klinik menerapkan klaster-klaster atau pengelompokan pasien untuk pelayanan kesehatan di klinik rawat jalan. Ini dimaksudkan agar masyarakat atau pasien yang sedang berobat tidak mengalami dan menunggu terlalu lama setelah melakukan pendaftaran online.

“Dalam rangka efektivitas pelayanan dan meminimalisir banyaknya antrean untuk memberikan kepastian layanan yang sesuai dengan

waktu jam pelayanan sesuai pendaftaran,” kata dr Tri Ratna Paramita saat ditemui Mediakaltim.com.

Lebih lanjut, dr Mitha mengatakan saat ini ada klinik saraf dan tiga klinik lainnya yang telah melakukan klaster untuk pasien pada saat pemeriksaan. Pengelompokan waktu pelayanan ini sesuai dengan waktu pendaftaran dan jam pelayanan dengan di kelompokkan dalam satu waktu.

“Yang sudah melakukan klaster ada klinik saraf. Ketika melakukan pendaftaran online maka sudah otomatis akan mendapatkan nomor dan waktu kedatangan,” jelasnya.

Selain itu, tiga klinik lainnya yakni klinik anak, klinik penyakit dalam dan klinik paru telah melakukan klaster atau pengelompokan dimulai sejak 8 November 2023.

“Per tanggal sesuai jadwal telah menerapkan klaster sesuai dengan waktu jam pengelompokannya. Pa-

sien yang datang sesuai dengan jam layanannya, apabila pasien datang tidak sesuai jam pelayanan maka tidak dilayani. Harapannya pasien datang sesuai dengan jam pelayanan agar tidak menunggu lama,” terang dr Mitha.

Dr Mitha mengatakan pengklasteran atau pengelompokan pasien ini baru dilaksanakan RSUD pada Agustus lalu dan berlanjut pada November ini pada beberapa klinik.

“Harapan ke depannya bisa berurutan dengan pasien-pasien klinik lainnya agar mengurangi antrean di ruang tunggu dan mengurangi penularan penyakit melalui airborne atau udara. Pasien bisa datang paling cepat 30 menit sebelum jadwal pelayanan yang tertera pada saat booking pendaftaran,” pungkasnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari



# MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



## KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama  
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan  
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy  
**THAT'S ALL**.COM